

Penambang liar kian marak,

pemprov Kalteng diminta segera tertibkan

<https://kalteng.antaranews.com/berita/278257/penambang-liar-kian-marak-pemprov-kalteng-diminta-segera-tertibkan>

Minggu, 25 Februari 2018 0:54 WIB

Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Tim reses daerah pemilihan I DPRD Kalimantan Tengah menerima keluhan dari masyarakat bahwa penambang liar semakin marak di Kabupaten Katingan, sehingga meminta Pemerintah Provinsi Kalteng segera bertindak dan menertibkannya.

Menurut informasi dari masyarakat Kabupaten Katingan, aktivitas tambang ilegal tersebut membuat bencana banjir dan tanah longsor semakin sering terjadi, kata Ketua Tim Reses Dapil I DPRD Kalteng, HM Sriosako di Palangka Raya, Sabtu.

"Kalau kondisinya sudah begitu, Pemprov harus segera menertibkan. Jangan sampai tambang liar itu membuat bencana yang lebih besar lagi. Pemerintah justru yang akan dibuat susah nantinya," tambah dia.

Baca: [DPRD Kalteng: jangan sampai tambang liar membuat bencana lebih besar](#)

Selain menertibkan tambang liar, tim reses dapil I DPRD Kalteng menerima keluhan dari masyarakat Kabupaten Katingan agar Pemprov menertibkan perusahaan besar swasta (PBS) perkebunan kelapa sawit.

Sriosako yang berada di Komisi A DPRD Kalteng ini menyebut masyarakat ada menemukan sejumlah PBS yang sudah melaksanakan kegiatannya padahal belum mengantongi izin resmi, sehingga bila dibiarkan terus menerus akan membuat rugi provinsi ini.

"Masyarakat Katingan juga mengeluhkan larangan membersihkan lahan tanpa bakar tapi tidak diikuti solusi lain. Jadi, masyarakat meminta solusi sekaligus adanya bantuan bibit bagi petani khususnya bibit Kopi, jahe dan sawit," kata dia.

Sementara di Kabupaten Gunung Mas, tim reses Dapil I DPRD Kalteng menerima usulan dari masyarakat agar Pemerintah membantu dalam menormalisasikan harga karet dan rotan.

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan sampai saat ini masyarakat terpaksa

menggantungkan hidupnya dari pertambangan emas liar, karena harga karet masih sangat rendah dan tidak mampu menopang kebutuhan hidup.

"Masyarakat Kabupaten Gunung Mas mengharapkan adanya campur tangan Pemerintah untuk membantu menormalkan harga karet dan rotan," demikian Sriosako.

Pewartar : Jaya Wirawana Manurung

Editor: Ronny